

**PERAN SEKOLAH POLITIK OLEH PARPOL DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN
DI KABUPATEN MERAUKE
PROVINSI PAPUA SELATAN**

Nursani Yunita Situmorang
NPP. 30.1496

*Asdaf Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: nursaniyunita@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Taslim Djafar, S.STP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The Role of Political Schools by Political Parties in Increasing Women's Participation in Politics in Merauke Regency. The low participation of women in politics in Merauke Regency, especially representation in DPRD seats, is still low. **Purpose:** The purpose of this study is to find out what political education activities are carried out for women participating in political education in Merauke Regency, South Papua Province. **Method:** This research uses descriptive qualitative methods and analysis of roles according to Biddle & Thomas Theory. Data collection techniques were carried out by semi-structured interviews (11 informants), and documentation. **Result:** The findings obtained by the author in this study are that women's political school participants in participating in political education are classified as sufficient, the implementation is classified as good, and the use of infrastructure is classified as sufficient, although it is still constrained by transportation problems. **Conclusion:** The role of political schools by political parties in increasing women's participation has gone well, this is due to the enthusiasm and willingness to learn from political school participants. In order to increase women's participation in politics, it is recommended to optimize the use of transportation.

Keywords: Role; Women's Participation; Political Parties

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peran Sekolah Politik Oleh Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Politik di Kabupaten Merauke. Rendahnya partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Merauke khususnya keterwakilan pada kursi DPRD masih rendah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa saja kegiatan pendidikan politik yang dilakukan terhadap perempuan peserta pendidikan politik di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan analisis terhadap peran menurut Teori Biddle & Thomas. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur (11 informan), dan dokumentasi.

Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu peserta sekolah politik perempuan dalam mengikuti pendidikan politik tergolong cukup, pada pelaksanaan tergolong baik, dan pemanfaatan sarana prasarana tergolong cukup, meskipun masih terkendala masalah transportasi. **Kesimpulan:** Peran Sekolah Politik Oleh Parpol dalam meningkatkan partisipasi perempuan telah berjalan dengan baik, hal ini karena adanya antusias dan kemauan belajar dari peserta sekolah politik. Guna meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan transportasi.

Kata Kunci: Peran, Partisipasi Perempuan, Partai Politik

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi dimana partisipasi perempuan dalam politik memegang peranan yang sangat penting. Dalam politik, perempuan memiliki karir dalam memperjuangkan prinsip keadilan, dimana perempuan mempunyai hak agar dapat berpartisipasi dalam dunia politik. Sistem politik demokrasi yang dianut dan dijalankan oleh suatu negara harus melibatkan publik dalam politik karena akan membantu memberikan pedoman atau arahan dalam segala pengambilan keputusan (Amirullah, 2016).

Di negara yang menganut sistem demokrasi, partisipasi laki-laki dan perempuan sebagai pemimpin politik dan pengambil keputusan berdampak pada keberlangsungan masyarakat di semua tingkatan, dan berdampak pada terciptanya pemerataan bagi seluruh warga negara. Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Pengesahan Konvensi Hak Politik Perempuan telah lama diratifikasi di Indonesia. Undang-Undang tersebut mengatur penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, memastikan bahwa perempuan memiliki hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dalam pemilihan umum, memastikan bahwa perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah. Perempuan memiliki hak untuk memegang jabatan publik dan melakukan fungsi umum, memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi dalam organisasi politik sosial politik. Namun, budaya patriarki tetap menjadi salah satu alasan mengapa partisipasi perempuan dalam posisi politik masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pemerintahan yang demokratis tidak akan berfungsi dengan baik tanpa partisipasi politik warga negara, laki-laki dan perempuan. Tanpa partisipasi politik dari masyarakat, maka pemerintahan yang demokratis tidak dapat berfungsi karena penguasa akan bertindak sewenang-wenang dan akan ada sikap sombong dari pihak pemerintah, hal ini akan merugikan bangsa dan negara.

Hak politik dan pendidikan politik bagi perempuan sudah saatnya untuk diperkuat dan diprioritaskan. Pendidikan politik perempuan harus secara jelas fokus pada kemampuan

perempuan untuk menyadari pentingnya perempuan yang terbebas dari marginalisasi politik, sehingga perempuan memiliki identitas yang kuat dalam kiprah politiknya. Pendidikan politik bagi perempuan ditujukan untuk membebaskan perempuan dari perlakuan yang tidak setara dan tidak ditujukan untuk kekuasaan atau dominasi seperti yang telah dilakukan. Namun, pemberdayaan politik perempuan tidak boleh dikompromikan dengan pemahaman politik kapitalis yang justru mengadu domba perempuan dengan laki-laki dalam perebutan kekuasaan. Pendidikan politik dapat dipahami sebagai upaya sadar untuk mengubah sosialisasi politik masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik.

Berdasarkan data dari KPU Kabupaten Merauke, komposisi anggota DPRD Kabupaten Merauke berjumlah 30 orang. Pada periode 2014-2019, keanggotaan DPRD Kabupaten Merauke terdiri atas 24 orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan. Dalam persentase, anggota DPRD perempuan Kabupaten Merauke hanya berjumlah 20%. Pada periode 2019-2024, keanggotaan DPRD Kabupaten Merauke terdiri atas 28 orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan. Dalam persentase, anggota DPRD perempuan Kabupaten Merauke hanya berjumlah 6,6%. Hal ini patut menjadi perhatian karena tuntutan akan representasi perempuan dalam politik semakin menurun. Perempuan telah melewati puluhan tahun menghadapi budaya patriarki, sehingga diperlukan momentum untuk mencapai kesetaraan dalam jumlah dan peran dalam jabatan politik.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, adapun sekolah politik bagi perempuan yang digagas oleh anggota Komisi V DPRD Papua Fauzun Nihayah. Sekolah ini didirikan oleh partai politik NasDem untuk kepentingan para aktivis dalam rangka menyatukan kepedulian dan komitmen pemberdayaan perempuan di Kabupaten Merauke. Sekolah politik perempuan bertempat di Rumah Aspirasi H. Sulaeman L. Hamzah sebagai organisasi yang fokus pada gerakan pemberdayaan perempuan, demokrasi dan penguatan hak-hak politik masyarakat. Materi-materi yang diberikan kepada peserta yakni *public speaking*, bernegosiasi, perempuan dan pemilu serta banyak materi lainnya. Materi yang diberikan dilaksanakan dengan adanya kolaborasi dengan beberapa narasumber yang aktif di NGO perempuan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan rendahnya partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Merauke ini. Faktor pendidikan adalah salah satunya. Pengetahuan akan politik yang masih kurang mengakibatkan partisipasi perempuan untuk berkecimpung dalam dunia politik

masih rendah. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kabupaten Merauke bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Merauke masih rendah. Pada periode 2014-2019, keanggotaan DPRD Kabupaten Merauke terdiri atas 24 orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan. Dalam persentase, anggota DPRD perempuan Kabupaten Merauke hanya berjumlah 20%. Pada periode 2019-2024, keanggotaan DPRD Kabupaten Merauke terdiri atas 28 orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan. Dalam persentase, anggota DPRD perempuan Kabupaten Merauke hanya berjumlah 6,6%. Hal ini patut menjadi perhatian karena tuntutan akan representasi perempuan dalam politik semakin menurun. Perempuan telah melewati puluhan tahun menghadapi budaya patriarki, sehingga diperlukan momentum untuk mencapai kesetaraan dalam jumlah dan peran dalam jabatan politik.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Amirullah berjudul *Pendidikan Politik Perempuan* (Amirullah, 2016), menemukan bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh partai bersifat lebih khusus dan berkualitas terhadap anggota dan kader perempuan partai. Setiap partai politik agar melakukan langkah-langkah konkrit dalam segi pendidikan dan pemberdayaan politik perempuan demi meningkatkan kesadaran politik dan memberikan bekal bagi karir politik perempuan seperti melakukan pembaharuan kebijakan internal yang mengatur konsep khusus bagi pendidikan politik perempuan. Penelitian Nurwindah Apriyani berjudul *Peran Sekolah Politik Perempuan Maupe Di Kabupaten Maros* (Nurwindah, 2017), menemukan bahwa peran SPPM di dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kabupaten Maros sangat berpengaruh. Dimana melalui pendidikan politik yang dilaksanakan, berhasil meningkatkan partisipasi politik khususnya perempuan yang selama ini sangat minim berdasarkan data yang ada. Penelitian Payerli Pasaribu berjudul *Peranan Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik* (Payerli, 2017), menemukan bahwa peranan partai politik menyalurkan pendapat aspirasi masyarakat dalam mengatur sedemikian rupa sehingga simpang siur pendapat dalam masyarakat berkurang. Partai politik memiliki suatu peranan penting dalam membentuk setiap partai yang di jalankan setiap anggota-anggotanya. Sebaiknya partai politik lebih memperhatikan akan hal-hal apa saja yang perlu dipenuhi dalam hal kepartaian serta melaksanakan tugasnya sebagai anggota partai politik dengan baik apabila sudah duduk di salah satu kursi dewan. Partai politik lebih lagi meningkatkan kualitas keanggotaannya tidak hanya berpatokan pada kaderisasi, namun harus melihat apa yang harus dicapai pada tujuan bersama.

Penelitian Ulfah Hidayati berjudul *Pendidikan Politik Bagi Perempuan Oleh Kesbangpol Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Di Kabupaten Kebumen* (Ulfah Hidayati, 2019), menemukan bahwa program pendidikan politik yang dilakukan oleh Kesbangpol sudah mengarah pada responsif gender yakni melalui kegiatan penyuluhan dan seminar dengan metode dialog, diskusi dan tanya jawab. Dimana dalam pelaksanaan pendidikan politik tersebut akses yang dimiliki perempuan terbuka lebar yaitu dengan adanya jumlah kuota untuk perempuan yang banyak akan tetapi partisipasi perempuan untuk berpolitik masih rendah. Kontrol Kesbangpol terhadap perempuan dengan mengupayakan menambah jumlah kuota pendidikan politik agar lebih aktif mengikuti kegiatan tersebut serta manfaat mengikuti pendidikan politik bagi perempuan adalah untuk menambah pengetahuan tentang politik, mengerti tentang nilai-nilai politik dan untuk berpartisipasi aktif di dalam politik. Penelitian Titik Wardiyah Amini berjudul *Perempuan Dalam Jerat Patriarki: Studi Upaya Pendidikan Politik Perempuan Pada Organisasi PW FATAYAT NU DIY* (Amini, 2021), menemukan bahwa pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PW Fatayat NU DIY melalui dua strategi, yaitu struktural dan kultural. Strategi struktural yaitu dengan cara sosialisasi dan diskusi, sedangkan metode kultural yaitu dengan cara motivasi dan dorongan dari pimpinan organisasi terhadap anggotanya untuk menjadi calon legislatif.

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik melalui kegiatan pendidikan politik oleh sekolah politik, pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori dari Biddle & Thomas (1966) yang menyatakan ada 4 istilah perilaku dalam kaitannya terhadap peran yaitu *expectation* (harapan) terdiri dari indikator tujuan dan keinginan kuat, *norm* (norma) terdiri dari indikator aturan, *performance* (wujud perilaku) terdiri dari indikator tindakan dan sumberdaya, *evaluation* (penilaian) & *sanction* (sanksi) terdiri dari indikator penilaian dan sanksi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai peran sekolah politik oleh partai politik dalam meningkatkan partisipasi perempuan di Kabupaten Merauke.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif yaitu metode penelitian atas fakta nyata dalam menemukan kebenaran gambaran suatu fenomena penelitian yang diselidiki setelah dikaitkan dengan teori yang relevan. Bentuk penyajiannya digambarkan secara sistematis dengan uraian kata-kata, nyata, tanpa banyak menyajikan data angka dan dianalisis sedemikian rupa sesuai dengan keadaan pada saat penelitian dilapangan sehingga menghasilkan kesimpulan suatu masalah general menuju spesifik (Sugiyono, 2013).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara semi terstruktur terhadap 11 (sebelas) orang informan yang terdiri dari Kepala Kesbangpol, Sekretaris KPUD, Pendiri Sekolah Politik Perempuan, Anggota Partai Politik sebanyak 3 orang, Tokoh Pemuda, Perwakilan masyarakat umum sebanyak 3 orang dan peserta sekolah politik

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran sekolah politik oleh partai politik dalam meningkatkan partisipasi perempuan di Kabupaten Merauke menggunakan teori dari Biddle & Thomas (1966) yang menyatakan ada 4 istilah perilaku dalam kaitannya terhadap peran yaitu *expectation* (harapan), *norm* (norma), *performance* (wujud perilaku), *evaluation* (penilaian) & *sanction* (sanksi). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 *Expectation* (Harapan)

Expectation (Harapan) merupakan bentuk keyakinan bahwa sesuatu yang diharapkan akan didapatkan atau suatu peristiwa baik akan terjadi di masa depan. *Expectation* (Harapan) adalah salah satu dimensi berdasarkan teori yang penulis gunakan yakni Teori Peran oleh Biddle dan Thomas. Adapun indikator-indikator dari dimensi *Expectation* (Harapan) yakni indikator Tujuan dan Keinginan Kuat. Indikator tujuan berkaitan dengan gagasan tentang masa depan, atau hasil yang diinginkan, direncanakan, dan dimaksudkan yang akan dicapai baik oleh seseorang atau sekelompok orang. Indikator keinginan kuat berkaitan dengan implementasi dari suatu organisasi yakni sesuatu yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.

Sekolah Politik oleh partai politik memiliki tujuan dan keinginan kuat untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Berikut adalah pembahasan mengenai indikator tujuan dan keinginan kuat.

A. Tujuan (*Goals*)

Tujuan (*Goals*) merupakan gagasan tentang masa depan, atau hasil yang diinginkan, direncanakan, dan dimaksudkan yang akan dicapai dalam hal ini oleh Sekolah Politik oleh Partai Politik dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Sekolah Politik yang diselenggarakan oleh Partai NasDem memiliki tujuan agar perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Merauke dapat berpartisipasi aktif dalam politik. Tujuan dari Sekolah Politik oleh Partai Politik yakni untuk mendidik dan juga membentuk karakter perempuan untuk berani tampil, bersuara, ditengah masyarakat. Dan juga agar perempuan dapat menjadi pribadi yang tangguh dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dalam kancah politik.

B. Keinginan Kuat (*Willpower*)

Keinginan kuat (*Willpower*) merupakan suatu hal yang berkaitan dengan sesuatu yang terarah dan juga Implementasi dari suatu organisasi yakni sesuatu yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Dalam hal ini yakni Sekolah politik oleh partai politik memiliki keinginan kuat dengan hadirnya sekolah politik ini kiranya kedepannya dapat semakin bertambah partisipasi aktif perempuan dalam politik. Indikator keinginan kuat terkait dengan adanya sekolah politik perempuan oleh partai politik dapat disimpulkan bahwa tujuan adanya sekolah politik oleh partai politik agar perempuan yang ada di Kabupaten Merauke bisa lebih aktif dalam dunia politik, menunjukkan potensi bukan hanya sebagai pelengkap saja. Dan juga keinginan kuat adanya sekolah politik tersebut yakni peserta yang tergabung dalam sekolah politik dapat berjuang sampai duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) khususnya di Kabupaten Merauke.

3.2 Norm (*Norma*)

Norm (*Norma*) merupakan sebuah tatanan, aturan ataupun pedoman yang digunakan dalam hal ini sekolah politik oleh partai politik memiliki beberapa aturan atau pedoman dalam hal merekrut peserta sekolah politik. Namun, dalam hal terkait regulasi berdirinya sekolah ini belum ada regulasi khusus dalam mendirikan sekolah ini karena sekolah politik ini bersifat informal berdasarkan hasil wawancara dengan pendiri sekolah ibu Fauzun Nihayah. Aturan adalah indikator dari dimensi *Norma* (*Norm*) berdasarkan teori yang penulis gunakan. Berikut pembahasan mengenai indikator aturan.

A. Aturan

Aturan yang terkait dengan sekolah politik perempuan oleh partai politik yakni dalam mendirikan sekolah ini belum adanya aturan khusus yang digunakan sebagai landasan berdirinya sekolah ini. Selanjutnya, perekrutan anggota sekolah politik oleh partai politik tersebut yakni mereka yang sudah lulus SMA dan maksimal berusia 35 tahun karena sekolah ini sebagai swadaya yang mencari perempuan-perempuan produktif.

3.3 Performance (Wujud Perilaku)

Performance (Wujud Perilaku) berkaitan dengan kemampuan dalam pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi dalam hal ini bagaimana dan apa saja yang dilakukan sekolah politik oleh partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik.

Tindakan dan Sumber Daya adalah indikator dari dimensi *Performance* (Wujud Perilaku) berdasarkan teori yang penulis gunakan. Berikut adalah pembahasan mengenai indikator tindakan dan sumber daya.

A. Tindakan

Indikator tindakan dapat disimpulkan bahwa materi-materi yang diberikan dalam pendidikan politik terdiri atas materi perempuan dan hukum, perempuan dan pemilu dan sebagainya. Namun, yang tidak kalah pentingnya dari indikator tindakan ini yakni bagaimana agar peserta pendidikan politik harus mengerti dan memahami perannya dalam ranah politik sehingga perempuan dapat mengetahui jati dirinya dan dapat mengambil bagian dalam pengambilan keputusan dalam politik untuk dapat menyuarkan aspirasinya.

B. Sumberdaya

Indikator sumber daya yang menunjang berjalannya sekolah politik perempuan oleh partai politik yakni sumberdaya terdiri atas sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, sumberdaya anggaran serta sumberdaya informasi. Sumberdaya inilah yang harus diperhatikan agar dalam pelaksanaan pendidikan politik dapat berjalan secara maksimal.

3.4 Evaluation (Penilaian) & Sanction (Sanksi)

Evaluation & Sanction (Penilaian & Sanksi), penilaian berkaitan dengan kesan positif atau negative yang diberikan masyarakat sedangkan sanksi berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh sekolah politik dalam mempertahankan suatu nilai positif. Penilaian dan Sanksi adalah

indikator dari dimensi Penilaian (*Evaluation*) dan Sanksi (*Sanction*) berdasarkan teori yang penulis gunakan. Berikut adalah pembahasan mengenai indikator penilaian dan sanksi.

A. Penilaian

penilaian yang diberikan terhadap Sekolah Politik oleh Partai Politik dapat disimpulkan bahwa sekolah politik sudah mendapat respon positif baik dari masyarakat, peserta sekolah itu sendiri dan juga stakeholder. Mereka juga berharap agar sekolah politik ini sebagai jembatan untuk perempuan-perempuan yang ingin berkecimpung dalam dunia politik.

B. Sanksi

Penilaian dan sanksi terkait dengan sekolah politik perempuan oleh partai politik yakni sekolah politik yang dilaksanakan oleh ibu Fauzun Nihayah sudah mendapatkan respon positif dari berbagai pihak baik dari peserta sekolah politik itu sendiri, tokoh pemuda dan juga masyarakat umum.

3.5 Faktor Pendukung & Faktor Penghambat

Faktor yang mendukung berjalannya sekolah politik perempuan di Kabupaten Merauke dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan tidak terlepas dari semangat pendiri sekolah politik perempuan dan juga dukungan-dukungan dari stakeholder serta masyarakat di Kabupaten Merauke serta penunjang lainnya. Faktor pendukung antara lain:

a) Dukungan Dari Masyarakat dan Stakeholder

Dukungan dari masyarakat dan *stakeholder* adalah salah satu faktor pendukung yang penting. Karena tanpa dukungan dari masyarakat dan stakeholder, sekolah politik oleh partai politik tidak dapat berjalan dengan baik.

b) Narasumber Akademisi dan Politisi

Narasumber merupakan orang yang memberikan sebuah informasi yang jelas dan akurat untuk membantu menunjang peserta sekolah politik dalam memperoleh informasi-informasi terbaru terkait politik.

c) Seragam

Seragam merupakan salah satu faktor pendukung yang penting. Karena dalam sekolah politik tersebut seragam berfungsi untuk menyeragamkan dan menciptakan rasa keanggotaan sekolah. Seragam sebagai identitas peserta sekolah politik.

d) Modul pembelajaran

Modul pembelajaran diberikan kepada peserta sekolah politik untuk mempelajari politik secara mandiri yang didalam modul tersebut sudah ada petunjuk dan komponen yang jelas sehingga peserta dapat mempelajari secara runtut tanpa seorang pengajar.

Faktor penghambat dalam sekolah politik oleh partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik yakni tempat tinggal para peserta sekolah yang cukup jauh. Hal ini juga dilihat dari segi ekonomi peserta sekolah politik tidak seluruhnya ekonominya menengah keatas, melainkan ada juga yang menengah kebawah. Berdasarkan uraian diatas, faktor penghambat sekolah politik tersebut yakni tempat tinggal peserta yang cukup jauh dari tempat lokasi sekolah dimana dapat dikatakan konteks sarana dan prasarana masih belum memadai untuk menunjang proses pendidikan politik.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan pendidikan politik oleh sekolah politik telah memberikan dampak positif bagi kaum perempuan di Kabupaten Merauke. Perempuan-perempuan produktif yang ingin belajar dan mengetahui tentang politik dapat bergabung pada sekolah politik yang digagas oleh Fauzun Nihayah. Sekolah politik perempuan yang didirikan sebagai salah satu sarana pengembangan diri khususnya dalam bidang politik bagi kaum perempuan yang ada di Kabupaten Merauke. Penulis menemukan temuan penting yakni melalui pelaksanaan pendidikan politik peserta sekolah politik yang telah bergabung telah berpartisipasi aktif dan cukup baik dikarenakan pihak sekolah politik telah memberikan sarana dan prasarana untuk menunjang berjalannya pelaksanaan pendidikan politik, sama halnya dengan temuan Nurwindah Aprilyani juga mengatakan bahwa dimana melalui pendidikan politik yang dilaksanakan, berhasil meningkatkan partisipasi politik khususnya perempuan (Nurwindah, 2017). Perempuan di Kabupaten Merauke merupakan kunci berjalannya pelaksanaan pendidikan politik oleh sekolah politik perempuan di Kabupaten Merauke. Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh sekolah politik di Kabupaten Merauke diselenggarakan untuk perempuan-perempuan produktif yang ingin belajar dan berkecimpung dalam dunia politik, berbeda dengan temuan penelitian Amirullah bahwa pendidikan politik yang dilakukan dikhususkan terhadap anggota dan kader perempuan partai (Amirullah, 2016).

Temuan ini juga menolak penelitian sebelumnya oleh Payerli karena perbedaan karakteristik objek penelitian yakni penelitian sebelumnya difokuskan untuk anggota partai politik (Payerli, 2017). Selanjutnya, dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh sekolah politik di Kabupaten

Merauke adanya narasumber-narasumber yang berasal dari kalangan politisi, disediakan modul pembelajaran, dan juga adanya diskusi-diskusi dan juga tanya jawab, sama halnya dengan temuan Ulfah Hidayati mengatakan bahwa program pendidikan politik yang dilakukan sudah mengarah pada responsif gender yakni melalui kegiatan penyuluhan dan seminar dengan metode dialog, diskusi dan tanya jawab (Ulfah Hidayati, 2019). Temuan ini juga menolak penelitian sebelumnya oleh Titik Wardiyah Amini karena perbedaan karakteristik objek penelitian yakni penelitian sebelumnya difokuskan Pada Organisasi PW FATAYAT NU DIY. (Amini, 2021).

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa peran sekolah politik oleh partai politik dalam meningkatkan partisipasi perempuan di kabupaten merauke provinsi papua selatan dapat disimpulkan belum optimal. Hal ini disebabkan karena dimensi wujud perilaku (*performance*) indikator sumberdaya yakni sarana dan prasarana transportasi masih belum memadai, hal ini kiranya dapat menjadi perhatian lebih agar dapat mengakomodir para peserta yang mengalami kendala jarak tempat tinggal yang jauh yang membutuhkan transportasi dengan memberikan bantuan transportasi.

Dengan adanya sekolah politik oleh partai politik dalam meningkatkan partisipasi perempuan adalah bahwa sekolah politik tersebut dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat partisipasi politik perempuan dan membantu mereka untuk meraih posisi-posisi penting dalam politik. Sekolah politik juga dapat membantu untuk membangun kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap perempuan dalam politik, sehingga dapat memperkuat pengaruh dan suara perempuan dalam kebijakan publik.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni pada waktu penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pendidikan politik bagi perempuan yang dilaksanakan sekolah politik di Kabupaten Merauke untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Penggagas sekolah politik beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alfian. 1978. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Aruni, R. 2016. *Gender dan Politik: Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. UNIMAL PRESS.
- Budiarjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. 1966. *Role theory: Concepts and research*. John Wiley & Sons.
- Hardani, A. N. H., Andriani, H., Fardani, R.A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Miles, M. B., & Huberman, M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Rasyidin. 2014. *Politik Gender Aceh Studi Tentang Pemberdayaan Politik Gender Di Provinsi Aceh Pasca MoU Helsinki*. Nanggroe Aceh Darussalam: UNIMAL PRESS.
- Salim, & Syahrudin. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Haidir (ed.))*. Bandung: Citapustaka Media.
- Simangunsong, F. 2017. *Metode Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Surbakti. 1992. *Urgensi Pendidikan Politik Bagi Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Widiasama.

JURNAL

- Amini, T. W. (2021). Perempuan Dalam Jerat Patriarki: Studi Upaya Pendidikan Politik Perempuan Pada Organisasi PW FATAYAT NU DIY. *skripsi fakultas ilmu sosial dan humaniora*.
- Amirullah. (2016). Pendidikan Politik Perempuan. *Jurnal Politik*. Vol 7 No 1: 1-2
- Hidayati, U. (2019). Pendidikan Politik Bagi Perempuan Oleh Kesbangpol Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Politik di Kabupaten Kebumen. *Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang*.
- Nimrah Siti dan Sakaria. Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014). *Jurnal The Politics*. Vol.1 No. 2. Hal 179-180. Juli 2015

- Nurchahyo Abraham. Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *Jurnal Agastya*. Vol 6 No 1. Hal 29-30. Januari 2016
- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*.
- Pradika, M. G. (2018). Peran Pemuda Dalam Pengurangan Risiko Bencana Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(2), 261.
- Rumbewas, S. S. (2018). Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik di Sd Negeri Saribi. *Jurnal EduMatSains*, 2(2), 201-212.
- Soeharto Achmad. 2011. Urgensi Pendidikan Politik Bagi Perempuan. *Jurnal Muwazah*. Vol 3 No 1: 328-329, Juli 2010
- Warjiyanti Sri. 2016. Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol 6 No 2: 3-4
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Jurnal Politik Islam*.
- Widada., d. (2017). Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi RSUD Hasanuddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor Sosial Nasional dan program BPJS Kesehatan. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(2), 199-216.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang RI Nomor 68 Tahun 1958 Tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

SUMBER LAINNYA

Gerintya, S. 2017. Kuota Perempuan di Parlemen belum tercapai. Retrieved from Tirto.id, Diakses Pada 10 September 2022

Hidayati, U. 2019. Pendidikan Politik Bagi Perempuan Oleh Kesbangpol Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Di Kabupaten Kebumen. Diakses pada 12 September 2022

Natri, Ayu Putu. 2004. Perempuan dan Politik. *Jurnal Perempuan* (online). <http://www.gender>, diakses 10 September 2022

Nuqul, F. L. (2018). Konsep dan Teori dalam Psikologi Sosial. *Jurnal Psikologi [Internet]*. [Diunduh pada 2022 Oktober 20]. Tersedia Pada: <Http://Repository>. Uin-Malang. Ac. Id/3755/1/Teori%20Peran_Role%20Theory. Pdf. Diakses pada 09 September 2022

